

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan ombudsman Republik Indonesia atas nama NTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan baik oleh penyelenggara negara maupun penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelenggara negara. perusahaan yang dimiliki. Perusahaan, Badan Usaha Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Instansi Pemerintah Perorangan atau perseorangan yang disertai tugas pengelolaan pelayanan publik tertentu. Sebagian atau seluruh pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pelaksanaan Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat pada Pelayanan Publik Kementerian Kependudukan dan Kewarganegaraan Kabupaten Lombok Barat yaitu kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai penyelenggara instansi administrasi dan pengelolaan kependudukan layanan dalam yurisdiksinya, tentu saja. Berlaku sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Ordonansi Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan Pengendalian Penipuan Biro Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Lombok Barat pada hari Selasa 2008, Kabupaten Lombok Barat Nomor 37 Tahun 1945 Pasal 20 dan 21

Undang-Undang Dasar Tahun, dan Pasal 5 (1), 18 (2), 20, 27, 28A, 28B UU Kepegawaian Tahun 2009. Termasuk dalam pasal tersebut. , Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I (2) dan Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Saran yang disarankan penulis adalah:

1. Kantor Perwakilan Ombudsman NTB hendaknya lebih sering menjalin hubungan dengan masyarakat umum terkait kewenangan ombudsman terkait pengelolaan fraud terkait pelayanan publik, dan lebih aktif melaporkan pengelolaan fraud yang berlaku khususnya di Ducapil Lombok Barat.
2. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, masyarakat terpuaskan secara administrasi, dan pegawai yang melakukan kecurangan administrasi akan dikenakan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU / LITERASI

- Adrian Sutedi, 2011, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawaliipers Jakarta.
- Amanwinata, 1996, "*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Bersdan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*", Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Andi Hamzah, 2016 "*Kamus Istilah Hukum*", Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- H. Kriswahyu, dkk. 2017. "*Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 survei Ombudsman RI*." Jakarta selatan.
- Jhonny Ibrahim, 2006. "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Bayumedia Publishing, Malang.
- Karen Amstrong, 2015 "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Modern*", Jakarta, Rajawali.
- Lukman Hakim, 2012. "*Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*", Malang: Setara Press.
- Masturi, Budhi. (2005). "*Mengenal Ombudsman Indonesia* .Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mc. Wija, 2012, "*Komisi Ombudsman Dalam Tatanan Pemerintahan Modern*", Jakarta, Binangkit.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: PustakaPelajar).

Nandang Alamsah Deliarnoor, 2013. *Teori & praktek kewenangan Pemerintah*, Unpad press.

Nuryanto A. Daim, "Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan H.R." 2003, "Hukum Administrasi Negara", UII Press, Yogyakarta.

Sadjiono. 2008 Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi (Yogyakarta: LaksBang presindo).

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara. 2013/Nomor. 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5475

Indonesia, Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Lembaran Negara. 2008/Nomor. 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4899

Indonesia, Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5038

Keppres Nomor 44 Tahun 2000, tentang pengawasan ombudsman.

C. JURNAL

Ayu Desiana, 'Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik', Ilmu Hukum, 6.2 (2013),

Adhar Hakim, 'Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan

Pemerintah Daerah Terhadap Undang- Publik Compliance Toward the Act No . 25 of 2009 Concerning', 2015, 1–18.

Eufemia Lawati Salabbaet.'*Kewenangan Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik.*Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 3 Nomor 1 2018.

Setiadjeng Kadarsih, '*Tugas Dan Wewenang Ombudsman RepublikIndonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008*', Jurnal Dinamika Hukum.

La Tarifu, '*Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada DinasKependudukanDan Catatan Sipil Kota Kendari*', Journal Publicuho, 3.2 (2020)

D. SUMBER LAINNYA

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengawasan-pelayanan-publik>-Diakses pada tanggal 1 Januari 2022. Pukul: 23.11 WITA

<https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2022. Pukul 23.50 WITA

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.

Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2022. Pukul 12.45 WITA

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik>. Diakses Pada tanggal 3 Januari 2022. Pukul 22.00 WITA

<https://kumparan.com/berita-update/pengertian-dan-unsur-negara-hukum-di-indonesia-1wifxndGB7/full>. Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2022, Pada Pukul 22.00 WITA

<https://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan-Bab%20II.pdf>,Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2022, pada pukul 20.50 WITA

<https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/509/prinsip-prinsip-pelayanan-publik>,Diakses pada pukul 3 Februari 2022 , pada Pukul 00.57 WITA